

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini tentu tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain sehingga penelitian yang akan dilakukan memiliki keterkaitan yang sama beserta persamaan maupun perbedaan dalam objek yang akan diteliti.

1. **Aurellia Adi Leksono dan Sansaloni Butar Butar (2018)**

Penelitian ini menguji peranan tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan dalam meningkatkan pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan (CSR). Tata kelola perusahaan dalam penelitian ini adalah frekuensi pertemuan komite audit dan ukuran dewan komisaris. Sampel dalam penelitian diperoleh dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengambil bagian dalam Indonesian Sustainability Report Award (ISRA) pada tahun 2014 hingga 2016. Sebanyak 22 perusahaan yang dapat digunakan untuk analisis lanjutan. Menggunakan analisis regresi linier berganda, hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan CSR dan merupakan satu-satunya hipotesis yang diterima di dalam penelitian ini; ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, sedangkan frekuensi pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap pengungkapan CSR. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dewan komisaris dan komite audit.
- b. Metode pemilihan sampel menggunakan teknik purposive sampling.
- c. Kesamaan dalam penggunaan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sample yang digunakan yaitu pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengambil bagian dalam Indonesian Sustainability Report Award (ISRA) pada tahun 2014 hingga 2016, sedangkan peneliti sekarang menggunakan sample dari perusahaan Industri Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan yang tidak digunakan dalam peneliti yang sekarang .

2. **Muhammad Restu, Willy Sri Yuliandari dan Annisa Nurbaiti (2017)**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen dan ukuran komite audit terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2016.

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi data yang bersumber pada laporan keberlanjutan dan laporan tahunan yang dipublikasikan

melalui Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan pengumpulan sampel menggunakan *purposive sampling* didapatkan jumlah sampel dari penelitian ini sebanyak 10 perusahaan dari Indeks SRI-KEHATI yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2013-2016. Berdasarkan hasil pengujian menggunakan software Eviews versi 9.5, secara simultan variable independen yang terdiri dari profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengujian secara parsial menunjukkan hasil bahwa *leverage* dan kepemilikan saham publik memiliki pengaruh signifikan kearah negatif, sedangkan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel dewan komisaris dan komite audit.
- b. Metode pemilihan sampling menggunakan *purposive sampling*.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan BUMN yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2013-2016, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

- b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen profitabilitas, *leverage*, dan kepemilikan saham publik yang tidak digunakan dalam peneliti sekarang.

3. Anna Sukasih dan Eko Sugiyanto (2017)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit, ukuran dewan komisaris dan kinerja lingkungan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*. Obyek penelitian yang digunakan adalah pada perusahaan industry manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2011-2015.

Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang menghasilkan sebanyak 24 perusahaan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, menyimpulkan bahwa secara parsial, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, akan tetapi berpengaruh negatif. Sedangkan komite audit, ukuran dewan komisaris dan kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, ukuran dewan komisaris dan komite audit.
- b. Metode pemilihan sampling menggunakan purposive sampling.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Penelitian terdahulu menggunakan sampel perusahaan industry manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2011-2015, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
- b. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen kinerja lingkungan yang mana variable tersebut tidak digunakan dalam peneliti sekarang.

4. Widya Novita Sari dan Puspita Rani (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, Return On Assets (ROA) dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Penelitian ini menggunakan 36 sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, *return on assets* berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*, dan ukuran perusahaan positif berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate*

social responsibility . Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
- b. Metode pemilihan sampling menggunakan purposive sampling.
- c. Kesamaan penggunaan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Peneliti terdahulu menggunakan variabel independen ROA dan ukuran perusahaan yang tidak digunakan dalam peneliti sekarang.
- b. Penelitian terdahulu menggunakan sampel semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013, sedangkan penelitian ini menggunakan sampel perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

5. Teddy Jurnal (2015)

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan dan karakteristik perusahaan terhadap *corporate social responsibility*. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Alat analisis untuk menguji hipotesis menggunakan regresi data panel. Hasil penelitian tata kelola terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan bahwa komisaris independen, kepemilikan individual,

kepemilikan pemerintah dan komite audit berpengaruh signifikan positif. Hasil penelitian karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial menunjukkan ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas, umur perusahaan, ukuran perusahaan audit berpengaruh signifikan positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial, namun margin kontribusi likuiditas dan efek pengungkit keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen Dewan Komisaris dan Komite Audit.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode purposive sampling.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2009-2013, sedangkan sampel dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
- b. Variabel independen dari peneliti terdahulu yaitu margin kontribusi likuiditas, efek pengungkit keuangan, kepemilikan individual, kepemilikan pemerintah, ukuran perusahaan, profitabilitas, likuiditas,

umur perusahaan dan ukuran perusahaan audit merupakan variable independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang.

6. **Grigoris Giannarakis (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan dan karakteristik keuangan dan tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) di Amerika Serikat. Tata kelola perusahaan dan karakteristik keuangan ini terdiri dari rapat dewan, usia rata-rata anggota dewan, kehadiran wanita di dewan, ukuran dewan, kualitas *chief executive officer*, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, komposisi dewan dan komitmen dewan terhadap CSR. Populasi penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Fortune tahun 2011 yang berjumlah 500 perusahaan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, komitmen dewan terhadap CSR dan profitabilitas ditemukan berhubungan positif dengan tingkat pengungkapan CSR, sedangkan leverage berpengaruh secara negatif dengan tingkat pengungkapan CSR.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel ukuran dewan komisaris.
- b. Menggunakan analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan yang terdaftar Fortune tahun 2011 sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

b. Variable independen yang digunakan peneliti terdahulu yaitu karakteristik keuangan ini terdiri dari rapat dewan, usia rata-rata anggota dewan, kehadiran wanita di dewan, kualitas *chief executive officer*, leverage, profitabilitas, ukuran perusahaan, komposisi dewan dan komitmen dewan merupakan variable independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang.

7. **Al Azhar L (2014)**

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh positif proporsi dewan komisaris independen, proporsi komite audit independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial terhadap luas pengungkapan CSR pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah 31 bank umum yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada periode 2009-2011. Dengan metode purposive sampling, sampel yang dikumpulkan adalah 28 bank sedangkan sumber data adalah laporan tahunan, dengan jumlah 84 laporan. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan metode penggabungan (pooling data) merupakan model yang diperoleh dengan mengkombinasikan atau mengumpulkan semua data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dewan komisaris independen, komite audit independen, kepemilikan institusional dan

kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan negatif terhadap luas pengungkapan CSR pada laporan tahunan perusahaan perbankan di Indonesia.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada:

- a. Kesamaan variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
- b. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada:

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2009-2011 sedangkan sampel dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
- b. Variable independen yang digunakan peneliti terdahulu yang terdiri dari dewan komisaris independen, komite audit merupakan variabel independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang.

8. Fahry Maulana dan Etna Nur Afri Yuyetta (2014)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI tahun 2009-2012. Dari hasil analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa

secara parsial profitabilitas dan leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kelengkapan pengungkapan. Sedangkan secara parsial ukuran perusahaan dan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen dewan komisaris.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode purposive sampling.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2012 sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.
- b. Variable independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan adalah variable independen yang tidak digunakan oleh peneliti sekarang.

9. Mega Dwi Arini Untoro dan Zulaikha (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik GCG terhadap *corporate social responsibility disclosure* pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2008-2011. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 100 perusahaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Proporsi komisaris independen, komite audit, profitabilitas dan leverage tidak memiliki pengaruh terhadap *corporate social responsibility*. Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen dewan komisaris dan komite audit.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode purposive sampling.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2008-2011 sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017.

- b. Variabel independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu proporsi komisaris independen, profitabilitas dan leverage tidak digunakan oleh peneliti sekarang.

10. Chintya Fadila Laksmitaningrum dan Agus Purwanto (2013)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan terhadap *corporate social responsibility* pada perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2011. Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling dengan jumlah 148 perusahaan. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa profitabilitas, likuiditas, ukuran dewan komisaris dan kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*. Leverage, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*.

Terdapat persamaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu yang terletak pada :

- a. Kesamaan variabel yang digunakan oleh peneliti terdahulu dan peneliti yang sekarang yaitu menggunakan variabel independen kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial.
- b. Metode pemilihan sampel yang digunakan dipilih dengan metode purposive sampling.
- c. Menggunakan teknik analisis regresi linier berganda.

Terdapat perbedaan antara peneliti sekarang dengan peneliti terdahulu terletak pada :

- a. Sampel yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah perusahaan industry manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2011 sedangkan sample dari peneliti yang sekarang menggunakan daftar perusahaan industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2014-2017
- b. Variable independen yang digunakan oleh peneliti terdahulu yaitu kepemilikan asing, profitabilitas, likuiditas, leverage dan ukuran perusahaan tidak digunakan dalam peneliti sekarang.

2.2 Landasan Teori

Pada sub bab ini, akan diuraikan teori-teori yang melandasi dan mendukung penelitian ini. Teori-teori dalam sub bab ini akan disusun dari teori yang sifat nya umum menuju teori yang sifat nya khusus. Berikut adalah teori teori yang berkaitan dengan penelitian ini :

2.2.1 Teori Agensi

Menurut Anthony dan Govindarajan (2005), teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agen. Teori agensi memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara principal dan agen. *Principal* merupakan pihak yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama *principal*, sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh *principal* untuk menjalankan perusahaan. Pengaplikasian *agency theory* dapat terwujud dalam sebuah kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban

dari masing-masing pihak dengan tetap memperhitungkan manfaat secara keseluruhan. Kontrak kerja merupakan seperangkat aturan yang mengatur mekanisme bagi hasil, baik berupa keuntungan, return maupun resiko-resiko yang telah disetujui oleh prinsipal dan agen. Kontrak kerja menjadi optimal apabila dalam pelaksanaan kontrak dapat *fairness* (mencapai keadilan) antara *principal* dan agen yang memperlihatkan pelaksanaan kewajiban yang optimal oleh agen dan pemberian insentif imbalan khusus yang memuaskan dari *principal* ke agen (Scot William R, 2012).

Eisenhard (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012), menyatakan bahwa teori keagenan dilandasi oleh 3 asumsi yaitu:

- a. Asumsi tentang sifat manusia. Asumsi tentang manusia yang memiliki sifat mementingkan diri sendiri (*self interest*), memiliki keterbatasan rasionalitas (*bounded rationality*), dan tidak menyukai resiko (*risk aversion*).
- b. Asumsi tentang keorganisasian. Asumsi tentang adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, serta adanya *Asymmetric Information* (AI) antara prinsipal dengan agen.
- c. Asumsi tentang informasi. Asumsi tentang informasi yang dipandang sebagai barang komoditi yang dapat diperjualbelikan.

Baik *principal* maupun agen, keduanya mempunyai *bargaining position*. *Principal* sebagai pemilik modal memiliki hak atas akses terhadap informasi internal perusahaan, sedangkan agen yang bertugas menjalankan operasional perusahaan memiliki informasi terhadap kegiatan operasi dan kinerja perusahaan secara riil

dan menyeluruh, namun agen tidak memiliki wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan dikarenakan pengambilan keputusan merupakan wewenang dari *principal* selaku pemilik perusahaan.

Teori keagenan berperan penting terhadap akuntansi dalam menyediakan informasi setelah terjadinya suatu kejadian yang disebut sebagai peranan pasca keputusan. Peranan tersebut seringkali diasosiasikan dengan peran pengurusan (*stewardship*) akuntansi, dimana seorang agen melaporkan kejadian-kejadian di masa lalu kepada prinsipal. Hal tersebut akan memberikan akuntansi nilai umpan balik selain nilai prediktifnya. Dalam memotivasi agen prinsipal perlu merancang suatu kontrak sehingga dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak dikatakan efisien apabila memenuhi faktor berikut :

- a. Agen dan prinsipal memiliki informasi dengan kualitas dan jumlah yang sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi.
- b. Risiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya kecil, artinya agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya.

2.2.2 Corporate social responsibility

Menurut Undang-undang Perseroan Terbatas No.40 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri,

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Sedangkan menurut Jhon Elkington (1997) dalam (Agoes dan Ardana, 2009: 90) mengemukakan bahwa perkembangan *Corporate Social Responsibility* (CSR) diawali dengan munculnya *the triple botton line*, dimana konsep tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tidak lagi hanya memperhatikan catatan keuangan semata (*single bottom line*) melainkan harus meliputi aspek keuangan (*profit*), aspek sosial (*people*) dan aspek lingkungan (*planet*) atau yang sering dikenal dengan sebutan 3P. Berdasarkan konsep 3P yang dikemukakan oleh Elkington maka konsep CSR memadukan tiga fungsi perusahaan secara seimbang yang terdiri dari fungsi ekonomis, fungsi sosial, dan fungsi alamiah. Fungsi ekonomis yaitu fungsi untuk memperoleh keuntungan (*profit*) bagi perusahaan, fungsi sosial yaitu fungsi yang berperan melalui pemberdayaan manusianya yaitu para pemangku kepentingan dalam menjaga keadilan dan menanggung beban dari aktivitas perusahaan, sedangkan yang terakhir adalah fungsi alamiah yaitu berperan dalam menjaga kelestarian alam (*planet/bumi*) (Agoes dan Ardana, 2011: 90-91). Laporan CSR berisi tentang hal-hal yang berhubungan dengan strategi keberlanjutan dari perusahaan tersebut. Strategi tersebut tercermin dalam kegiatan apa saja yang dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga kesejahteraan karyawannya, pengelolaan polusi dan limbah yang dihasilkan dari proses produksi perusahaan, serta CSR yang dilakukan bagi kepentingan masyarakat dan lingkungan (Aurellia dan Sansaloni, 2018).

Adapun kewajiban untuk melaksanakan CSR pada perusahaan yang terdapat di Indonesia diatur dalam peraturan Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dalam pasal 74 :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan.
2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi perseroan itu sendiri, komunitas setempat, dan masyarakat sekitar. Hal ini dalam rangka mendukung terjalinnya hubungan perseroan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat (Prastowo dan Huda 2011:48).

Terdapat beberapa jenis indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, salah satunya adalah GRI (*Global Reporting Index*) dari *Global Reporting Initiative* yang merupakan suatu lembaga untuk mempromosikan

standar yang diciptakan dengan memberikan arahan bagi perusahaan-perusahaan dalam menerbitkan laporan berkelanjutan tentang CSR. *Global Reporting Initiative* adalah panduan yang digunakan untuk menyusun laporan CSR pada perusahaan. Dalam panduan GRI-G4 juga menyediakan panduan mengenai bagaimana menyajikan pengungkapan keberlanjutan dalam format yang berbeda, baik itu laporan keberlanjutan mandiri, laporan terpadu, laporan tahunan, laporan yang membahas norma-norma internasional tertentu, atau pelaporan online. Jenis pendekatan pengukuran GRI-G4 melalui isi laporan tahunan dengan aspek-aspek penilaian tanggungjawab sosial yang dikeluarkan oleh *GRI (Global Reporting Initiative)* yang diperoleh dari website www.globalreporting.org. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas, dan pemanfaatan *sustainability reporting*. Dalam standar GRI-G4 indikator kinerja dibagi menjadi 3 komponen utama, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial mencakup praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja, hak asasi manusia, masyarakat, tanggung jawab atas produk dengan total kinerja indikator mencapai 91 indikator (www.globalreporting.org).

2.2.3 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakan tujuan pribadi. Definisi ini mirip dengan definisi kekayaan, baik pribadi atau public (Rizky Ardhiyanto, 2014). Sebagai contoh, perusahaan perseroan adalah perusahaan yang memiliki strukturnya ditentukan

oleh jumlah saham yang dimiliki dalam perusahaan tersebut. Saham-saham tersebut diperjualbelikan di pasar modal sehingga apabila perusahaan memerlukan peningkatan pendanaan, perusahaan dapat menjual sahamnya kepada publik baik perseorangan atau pada institusi lain. Menurut Slamet Haryono (2005), struktur kepemilikan adalah komposisi modal antara hutang dan ekuitas termasuk juga proporsi antara kepemilikan saham *insider shareholders* dan *outsider shareholders*. Salah satu struktur kepemilikan yang ada dalam perusahaan yaitu kepemilikan institusional.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi lain atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain (Tarjo, 2008). Adanya kepemilikan oleh investor institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung keberadaan manajemen. Pengawasan tersebut akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham karena pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku oportunistik manajer (Vera Kusumawati, 2011). Salah satu usaha dalam pengawasan yaitu pemegang saham dapat meminta perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang lebih lengkap tidak hanya informasi terkait keuangan namun juga tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan atau

laporan *corporate social responsibility*. Rumus untuk mengukur kepemilikan institusional yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak institusi}}{\text{jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.2.4 Kepemilikan Manajerial

Istilah struktur kepemilikan menunjukkan fakta bahwa variabel - variabel yang penting dalam struktur modal tidak hanya ditentukan oleh jumlah relatif utang dan ekuitas tetapi juga persentase ekuitas yang dipegang oleh manajer (Jensen, M.C. dan Meckling, W.H., 1976). Menurut Mehran et al., (1992) dalam Aida (2004) kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Kepemilikan manajerial merupakan kondisi di mana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Tarigan, Josua dan Yulius Yogi Christiawan, 2007). Wahidahwati (2002) mendefinisikan kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris. Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana para manajer perusahaan merangkap jabatan sebagai manajemen perusahaan sekaligus pemegang saham yang turut aktif dalam pengambilan sebuah keputusan.

Keterlibatan manajer tersebut akan mendorong manajer untuk bertindak secara hati-hati karena pihak manajer akan turut menanggung konsekuensi atas semua keputusan yang diambilnya. Dengan adanya keterlibatan manajer sebagai

pemegang saham maka manajer akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan dan mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Salah satu cara yang dapat ditempuh yaitu dengan mengungkap informasi secara lengkap terkait *corporate social responsibility*. Rumus untuk mengukur kepemilikan manajerial yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajer}}{\text{jumlah saham perusahaan}} \times 100\%$$

2.2.5 Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pasal 1, definisi dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Menurut Sembiring (2005) pengukuran ukuran dewan komisaris menggunakan jumlah anggota dewan komisaris. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah untuk mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Anggota dewan komisaris disebut dengan nama komisaris. Ini berarti tugas dewan komisaris adalah melakukan :

- a. Pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan.
- b. Memberi nasihat kepada direksi.

Dewan komisaris dapat terdiri dari satu orang atau lebih yaitu presiden komisaris, wakil presiden komisaris, anggota komisaris dan komisaris independen. Dewan komisaris merupakan majelis, sehingga dalam hal dewan komisaris terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, maka setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris. Pengaturan mengenai besarnya jumlah anggota komisaris dapat diatur dalam anggaran dasar perseroan, disamping itu anggaran dasar perseroan juga dapat mengatur mengenai adanya 1 (satu) orang atau lebih komisaris independen dan 1 (satu) orang komisaris utusan. Adapun pengertian dari komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Indra Surya dan Ivan Yustiavandana, 2006). Rumus menghitung ukuran dewan komisaris :

$$\text{Dewan Komisaris} = \text{Jumlah Dewan Komisaris}$$

2.2.6 Komite Audit

Menurut Hiro Tugiman (1995) pengertian komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan komisaris perusahaan klien yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Konsep komite audit mulai diperkenalkan kepada dunia usaha di

Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Kemudian pada tahun 1970-an, New York Stock Exchange (NYSE) mulai mewajibkan keberadaan komite audit sebagai persyaratan pencatatan, sejak itu banyak negara yang membuat ketentuan mengenai komite audit. Sejalan dengan kecenderungan internasional tersebut, persyaratan semacam ini juga telah ditetapkan di Indonesia melalui Pedoman *Good Corporate Governance* yang diterbitkan pada bulan Mei 2002 (Toha, 2004).

Keberadaan komite audit diatur melalui Surat Edaran Bapepam Nomor SE- 03/PM/2002 (bagi perusahaan publik) dan Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-103/MBU/2002 (bagi BUMN). Komite Audit terdiri dari sedikitnya tiga orang, diketuai oleh komisaris independen perusahaan dengan dua orang eksternal yang independen serta menguasai dan memiliki latar belakang akuntansi dan keuangan. Menurut KNKG (2006), jumlah komite audit harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektifitas dalam pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit mempunyai fungsi membantu dewan komisaris untuk (1) meningkatkan kualitas laporan keuangan, (2) menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan, (3) meningkatkan efektifitas fungsi internal audit (SPI) maupun eksternal audit, serta (4) mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris atau pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/ atau pihak otoritas antara

lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik

- b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik
- c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya
- d. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi dan ruang lingkup penugasan
- e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal
- f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris
- g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik
- h. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik. Rumus untuk menghitung komite audit yaitu :

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

2.2.7 Hubungan kepemilikan institusional dengan pengungkapan *corporate social responsibility*

Kepemilikan institusional merupakan kondisi dimana institusi memiliki saham dalam suatu perusahaan. Tingkat kepemilikan institusional yang tinggi akan menimbulkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional sehingga dapat menghalangi perilaku opportunistik manajer. Menurut Mursalim (2007), kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses pengawasan.

Investor institusional umumnya merupakan pemegang saham yang cukup besar karena investor institusional berbentuk badan atau institusi sehingga memiliki pendanaan yang besar. Semakin besar jumlah kepemilikan institusional dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula tanggung jawab perusahaan untuk melaporkan semua informasi secara lengkap tidak hanya terkait keuangan namun juga terkait bagaimana tanggungjawab perusahaan terhadap lingkungan dan sosialnya. Dengan mengungkap laporan CSR maka perusahaan dapat bersifat lebih transparan kepada stakeholders sehingga dapat mempertahankan keberadaan stakeholder.

2.2.8 Hubungan kepemilikan manajerial dengan pengungkapan *corporate social responsibility*

Kepemilikan manajerial adalah kondisi yang menunjukkan bahwa manajer memiliki saham dalam perusahaan atau manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan (Rustiarini, 2011). Pihak manajerial adalah mereka yang duduk di dewan komisaris dan dewan direksi perusahaan.

Keberadaan manajemen perusahaan mempunyai latar belakang yang berbeda, antara lain pertama, mereka mewakili pemegang saham institusi, kedua, mereka adalah tenaga - tenaga profesional yang diangkat oleh pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Ketiga, hubungan antara manajemen dengan pemegang saham, rawan untuk terjadinya masalah keagenan (Naila Karima, 2014). Konflik di dalam perusahaan terjadi karena perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan pihak manajer perusahaan. Dengan menambah jumlah kepemilikan manajerial dalam perusahaan, maka manajemen akan merasakan dampak langsung atas setiap keputusan yang mereka ambil karena mereka menjadi pemilik perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Peningkatan atas kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan membuat kekayaan manajemen secara pribadi semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi resiko kehilangan kekayaannya dan akan lebih berhati-hati dalam membuat sebuah keputusan.

Seorang manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menselaraskan kepentingannya sebagai manajer dengan kepentingannya sebagai pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat kepemilikan manajemen, semakin tinggi pula motivasi untuk mengungkapkan aktivitas perusahaan yang dilakukan. Salah satu cara yang dilakukan oleh manajemen yaitu dengan mengungkapkan pelaporan CSR. Pengungkapan laporan CSR akan membuat keberadaan perusahaan akan diterima masyarakat sehingga dapat membawa dampak baik bagi keberlangsungan

perusahaan jangka panjang sehingga dapat menguntungkan perusahaan sekaligus pemegang saham.

2.2.9 Hubungan dewan komisaris dengan pengungkapan *corporate social responsibility*

Ukuran dewan komisaris yang dimaksud adalah jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki dalam perusahaan. Berdasarkan teori agensi, dewan komisaris merupakan mekanisme pengendali internal tertinggi yang bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen puncak. Individu yang bekerja sebagai anggota dewan komisaris merupakan hal penting dalam mengawasi aktivitas manajemen secara efektif (Sembiring, 2005). Berkaitan dengan ukuran dewan komisaris, Coller dan Gregory (1999) dalam Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan semakin mudah mengendalikan CEO dan pengawasan yang dilakukan akan semakin efektif. Sehingga dapat mengatasi masalah keagenan yang terjadi antara pihak manajemen dengan pemegang saham perusahaan. Semakin banyak jumlah dewan komisaris maka pihak manajemen perusahaan akan terdorong untuk lebih transparan dan mengungkapkan informasi secara lengkap terkait aktivitas perusahaan serta dampak dan tanggungjawab yang akan dilakukan oleh perusahaan melalui laporan CSR.

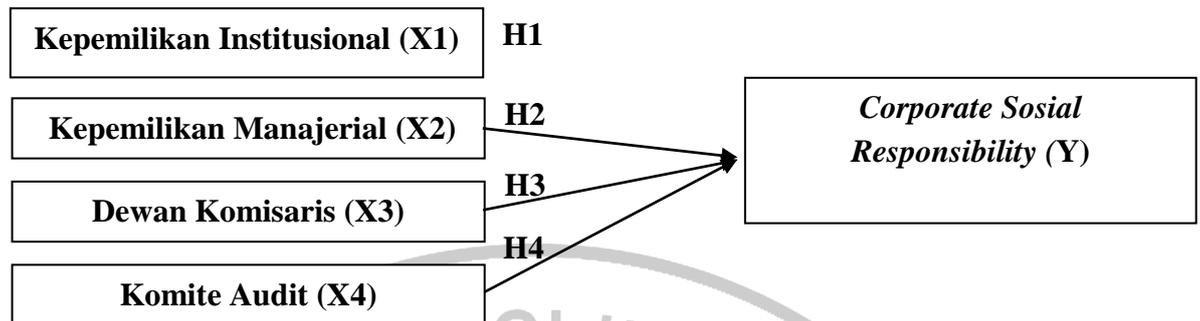
2.2.10 Hubungan komite audit dengan pengungkapan *corporate social responsibility*

Komite audit adalah suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris dan dengan demikian tugasnya

adalah membantu dan memperkuat dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari GCG di perusahaan-perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan dapat membantu kinerja dewan komisaris dalam pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial oleh perusahaan untuk mengatasi adanya konflik kepentingan yang timbul antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan. Ho dan Wong (2001) juga menjelaskan bahwa komite audit adalah sebuah proses tata kelola untuk mengawasi dan mengendalikan kinerja manajemen sehingga manajemen dituntut untuk memberikan informasi yang transparan kepada pemangku kepentingan dan turut meningkatkan pengungkapan tanggung jawab sosial yang lebih tinggi. Pendirian komite audit diyakini mampu menekan asimetris informasi, peluang manajemen dalam berbuat curang, dan meningkatkan kualitas dari pengungkapan. Dengan demikian semakin tinggi jumlah komite audit maka tingkat pengungkapan tanggung jawab sosial juga semakin baik (Teddy Jurnal, 2015).

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 merupakan kerangka pemikiran berdasarkan rumusan masalah dan hipotesis pada penelitian ini yang menjelaskan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:



2.4 Hipotesis

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

H3: Dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*

H4: Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*